



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Achmad Baidowi Anggota Komisi VI DPR Memang Diperlukan Ketegasan Pemerintah
Tanggal : Kamis, 10 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

ACHMAD BAIDOWI

Anggota Komisi VI DPR

Memang Diperlukan Ketegasan Pemerintah



“

**Jika Pemerintah dan
aparat menindak spekulasi-
spekulasi ini secara hukum,
saya setuju sekali karena
masalah ini menimbulkan
keresahan dan instabilitas
pangan.**

Bagaimana tanggapan Anda mengenai pernyataan Mendag yang akan memejahaukan para penimbun minyak goreng?

Pertama, ketegasan Pemerintah memang diperlukan untuk mencegah antisipasi kelangkaan minyak goreng di masyarakat. Cuma, kalau yang menimbulkan adalah warga, itu tidak benar.

Siapa dong yang diduga menimbun minyak goreng?

Kalau yang menimbulkan minyak goreng adalah spekulasi-spekulasi, bisa jadi benar. Jadi, kalau yang disasar adalah para spekulasi dan para tengkulak, saya setuju. Memang permainannya kemungkinan besar di situ.

Anda setuju jika para spekulasi ditindak?

Jika Pemerintah dan aparat menindak spekulasi-spekulasi ini secara hukum, saya setuju sekali karena masalah ini menimbulkan keresahan dan instabilitas pangan.

Anda yakin akan menimbulkan efek jera?

Iya dong, tindakan hukum itu perlu, supaya ada efek jera bagi para pelaku yang menimbulkan minyak goreng. Karena, yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia. Rakyat kecil.

Banyak terjadi antrean minyak goreng di berbagai daerah. Pendapat Anda?

Itu menunjukkan bahwa minyak goreng tidak ada di lapangan. Sedangkan Pemerintah mengklaim sudah mengelontarkan jutaan liter minyak goreng ke masyarakat.

Atau harga di lapangan masih mahal kali, sehingga warga memburu minyak goreng murah hasil operasi pasar?

Bisa jadi harga minyak goreng di bawah masih tinggi, karena pedagang juga tidak mau rugi. Pedagang belinya Rp 13 ribu, masa mau dijual 10 ribu.

Apa saran Anda untuk Pemerintah?

Kelangkaan minyak goreng terjadi

sejak Januari. Seharusnya, Pemerintah bisa mengantisipasinya sejak Januari lalu.

Selanjutnya, terkait kebijakan DMO (*Domestic Market Obligation*) atau untuk memenuhi kebutuhan domestik 30 persen. Pemerintah semestinya memberikan insentif bagi produsen yang memasarkan di dalam negeri.

Kenapa perlu dikasih insentif?

Kita akui memang kebutuhan eksport minyak goreng itu tinggi sekali dan sangat menggiurkan. Kalau tidak ada kebijakan DMO, maka produsen minyak goreng itu akan menjual barangnya ke luar negeri karena lebih menguntungkan dengan harga yang lebih kompetitif. Maka, perlu insentif, supaya produsen tidak menjual ke luar negeri dulu.

Apa yang perlu dilakukan agar persoalan ini tidak terus berulang?

Perlu perbaikan tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir. Distribusi ke publik juga harus dipantau. ■ REN